

**PENGARUH KETEPATAN SARASAN ANGGARAN DAN PENGENDALIAN  
MANAJERIAL SEKTOR PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KEPULAUAN  
MENTAWAI**

*The Effect Of Accurate Budget And Public Sector Managerial Control  
On Performance Accountability At The Public Works And Spatial Planning Office  
Of The Mentawai Islands*

**Dina Adawiyah; Delori Nancy Meyla; Solfiyeni**

Fakultas Ekonomi Universitas Ekasakti Padang

E-mail: [solfiyeni@gmail.com](mailto:solfiyeni@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini membahas pengaruh ketepatan sasaran anggaran dan pengendalian manajerial sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kepulauan Mentawai.

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden penelitian melalui penyebaran kuesioner. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Ketepatan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kepulauan Mentawai dengan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05. Variabel kontrol manajerial sektor publik berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kepulauan Mentawai dengan nilai signifikansi ( $0,001 < 0,05$ ). Variabel ketepatan sasaran anggaran dan pengendalian manajerial sektor publik berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kepulauan Mentawai dengan nilai signifikansi 0,000 yang berarti  $0,000 < 0,05$ .

Kata Kunci : Ketepatan Penargetan Anggaran, Pengendalian Manajerial Sektor Publik, Akuntabilitas Kinerja, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kepulauan Mentawai

**Abstrak**

*This study discusses the effect of the accuracy of budget targets and public sector managerial control on performance accountability at the Mentawai Islands Public Works and Spatial Planning Service.*

*Data processing in this research is using multiple regression model. The source of data in this study is primary data obtained directly from research respondents through questionnaires distributed. The sample taken in this study used a purposive sampling technique. The results of the analysis of this study indicate that the variable Accuracy of Budget Targets has a positive effect on Performance Accountability for employees of the Mentawai Islands Public Works and Spatial Planning Service with a significance value of 0.001 less than 0.05. The public sector managerial control variable has a positive effect on performance accountability at the Mentawai Islands Public Works and Spatial Planning Service with a significance value ( $0.001 < 0.05$ ). The variable accuracy of budget targets and managerial control of the public sector have a simultaneous effect on performance accountability at the Mentawai Islands Public Works and Spatial Planning Service with a significance value of 0.000 which means  $0.000 < 0.05$ .*

**Keywords** : Budget Targeting Accuracy, Public Sector Managerial Control, Performance Accountability, Mentawai Islands Public Works And Spatial Planning Service

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pesatnya perkembangan akuntansi memberikan perhatian lebih pada semua jenis organisasi tidak terkecuali organisasi-organisasi sektor publik. Pemerintah diharapkan untuk fokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja hasil. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan aturan dalam menerapkan sistem pertanggungjawaban yang efektif yang biasa disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Aspek akuntabilitas diakui sebagai nilai mendasar untuk pemerintahan yang baik di organisasi publik. Akuntabilitas adalah salah satu aspek utama dari organisasi publik yang memastikan berfungsinya dan meningkatkan pemantauan oleh para pemangku kepentingan utama (Aman et al., 2018).

Akuntabilitas merujuk pada standar atas kinerja seseorang yang didasarkan atas harapan masyarakat dan bisa digunakan untuk menilai hal penting seperti kinerja, derajat responsivitasnya, serta moralitas dari petugas yang melayani kepentingan public (Mahsun, 2016). Akuntabilitas berfokus pada penilaian perilaku agen publik sesuai dengan serangkaian standar. Akuntabilitas menjadi lebih penting, karena pemerintah perlu memberi tahu masyarakat tentang penggunaan dan pengelolaan sumber daya publik. Masyarakat memiliki hak dan wewenang untuk memperoleh informasi tentang kegiatan yang diperbuat oleh pemerintah yang seharusnya dipertanggungjawabkan, disajikan, dilaporkan, dan diungkapkan (Sugiarti & Yudianto, 2017).

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamemiliki kewajiban untuk menerapkan system akuntabilitas kinerja serta mengungkapkan pelaporannya. Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban dari pejabat yang memiliki tanggung jawab untuk melayani beberapa fungsi dari administrasi pada masing-masing lembaga, dan kemudian mempertanggungjawabkan serta memaparkan berhasil atau gagalnya tingkat kinerja mereka. Pengelolaan yang berakuntabilitas oleh pemerintah, tidak lepas dari anggaran, pada dasarnya, anggaran menempati posisi yang signifikan dan strategis dalam administrasi holistik dan keberlangsungan urusan suatu Negara (Ajibolade & Oboh, 2017).

Anggaran merupakan dokumen kebijakan yang dinyatakan dalam istilah keuangan yang berisi perkiraan pemerintah tentang pendapatan dan pengeluaran untuk periode tertentu, biasanya satu tahun (Mahmudi, 2016). Anggaran adalah instrumen ekonomi yang sangat diperlukan yang digunakan oleh pemerintah untuk memfasilitasi dan merealisasikan agenda yang telah disetujui. Selain itu, anggaran juga harus mempunyai sifat sistematis, yaitu bahwa anggaran disusun secara berurutan dan berdasarkan logika. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan secara tepat sasaran sehingga penyusunan anggaran dapat terealisasi pada organisasi sektor public (Ajibolade & Oboh, 2017).

Anggaran adalah sebuah pernyataan perkiraan kinerja yang ingin ditargetkan dalam satu periode tertentu dalam ukuran keuangan, sedangkan penganggaran merupakan proses persiapan penyediaan anggaran (Mardiasmo, 2019). Adanya kejelasan dan ketepatan dalam anggaran tentunya dapat memudahkan dalam mempertanggungjawabkan berhasil atau gagalnya tugas suatu organisasi sehingga memotivasi pekerja untuk mencapai tujuan organisasi.

Ketepatan sasaran anggaran dalam sistem pemerintahan daerah merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mengetahui kinerja yang terjadi di lapangan apakah tepat pada sasaran pembangunan dan perkembangan masyarakat. Aparatur pemerintah daerah

memiliki kejelasan untuk mengelola keuangan dengan tepat sehingga penyusunan anggaran pada periode selanjutnya dapat tercapai dengan baik pada instansi pemerintah. Ketepatan sasaran anggaran pada pemerintah daerah akan memberikan implikasi terhadap kinerja aparatur daerah yang lebih baik, maka hasil akhir dari kinerja sendiri merupakan hasil akhir (output) organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi (Suwandi, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh (Paramitha & Gayatri, 2016) menyatakan bahwa ketepatan anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Artinya, ketepatan sasaran anggaran yang baik dalam mulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD. Selain ketepatan sasaran anggaran pengendalian manajerial sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Pengendalian manajerial dalam organisasi sektor publik dapat membantu mempercepat pencapaian hasil yang tepat dimana hal tersebut diinginkan oleh pemerintah. Sistem pengendalian manajerial sektor publik merupakan rancangan sistem untuk mempengaruhi pihak-pihak yang terkait pada organisasi agar selaras dengan tujuan organisasi. Beberapa aktivitas yang perlu diterapkan dalam pengendalian manajerial sektor publik, diantaranya perencanaan, motivasi, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, pembuatan keputusan, sistem pengendalian, dan penilaian serta pelaporan kinerja (Mardiasmo, 2019).

Suatu organisasi sektor publik harus dapat menjalankan semua aktivitasnya sesuai dengan anggaran yang ditetapkan sebelumnya. Karena anggaran mempunyai kedudukan penting, maka suatu unit organisasi sektor publik harus mencatat anggaran dan melaporkan realisasi. Anggaran juga diperlukan dalam pengelolaan sumber daya yang baik, untuk menciptakan kinerja yang diharapkan oleh masyarakat. Dan untuk menciptakan akuntabilitas kinerja yang baik (Suwandi, A. P. 2017).

Kegiatan sektor publik saat ini merupakan kegiatan yang memiliki perhatian serius dalam masyarakat. Perencanaan tujuan, sasaran operasional, sampai dengan hasil yang diinginkan merupakan kerangka pemikiran mutlak yang diinginkan oleh setiap pemerintah. Untuk dapat merealisasikan ini, pemerintah dapat melakukan pengendalian dalam setiap proses pelaksanaannya. Sistem pengendalian manajerial yang terdapat pada sektor publik dapat menjadi suatu alat untuk mempercepat ketepatan hasil yang diinginkan pemerintah. Sistem pengendalian sektor publik berfokus pada bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai (Astari, 2018). Penelitian tentang pengendalian manajerial sektor public yang dilakukan oleh Astari (2017) Tresnawati (2016), Yosefrinaldi (2015) dan Febrianti (2015) menemukan bahwa pengendalian manajerial sektor publik berpengaruh positif signifikan pada akuntabilitas kinerja SKPD.

Pada kenyataannya, anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang (Bastian, 2016). Berikut hasil pengukuran data Akuntabilitas Kinerja pada Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kepulauan Mentawai:

Berdasarkan semua program target masih belum mencapai target, tanpa menjelaskan dan menyebutkan permasalahan dan hambatan apa yang terjadi sehingga menyebabkan ketidak sampaian target, hanya menyebutkan apa saja upaya untuk mencari solusi yang akan dilakukan dalam penanganan permasalahan dan perbaikan dalam sasaran yang telah dilakukan namun tidak mencapai target yang ditetapkan.

Sehingga dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kepulauan Mentawai dalam mencapai targetnya kurang baik dan harus adanya perbaikan dalam akuntabilitas kinerja instansi itu sendiri, serta masih adanya ke tidak transparan dalam menjelaskan proses dari hasil yang telah dicapai.

Pada dasarnya penyusunan akuntabilitas kinerja tidak terlepas dari siklus perencanaan, pelaksanaan, pelaporan atau pertanggungjawaban atas anggaran itu sendiri. Rencana strategis yang dituangkan dalam target tahunan pada akhirnya selalu dievaluasi dan diperbaiki terus menerus (Deputi IV Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: 2016:13). Intansi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sifat usahanya adalah bidang penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum, untuk mendapatkan keuntungan, harus bekerja lebih efisien. Hal ini disebabkan karena semakin kompetitifnya persaingan dan semakin naiknya standar kepuasan konsumen akan pelayanan jasa yang diberikan oleh perusahaan daerah tersebut. Intansi daerah juga harus senantiasa berusaha mencapai target anggaran yang telah ditetapkan agar memperoleh keuntungan yang maksimal, maka kualitas kinerja perlu diperhatikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran.

Peneliti memilih objek Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kepulauan Mentawai karena pada dalam pelaksanaan ketepatan anggaran belum optimal hal ini diketahui dari survei awal yang telah peneliti lakukan terhadap pegawai yang bekerja di Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kepulauan Mentawai. Selain itu banyak masyarakat yang kecewa penataan jalan di daerah mereka masih terbengkalai, sehingga banyak masyarakat yang mengeluh akses mereka merasa terganggu dan sering terjadi kecelakaan, jadi Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kepulauan Mentawai dalam menyediakan pelayanannya kepada masyarakat harus mempertimbangkan *cost and benefit* sehingga layanan yang diberikan akan benar-benar membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas jalan untuk transfortasi masyarakat yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan laba serta juga dapat meningkatkan kualitas anggaran.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaruh Ketepatan Sarasan Anggaran Dan Pengendalian Manajerial Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kepulauan Mentawai”**

### **Perumusan Masalah**

Ketepatan Sarasan Anggaran dan Pengendalian Manajerial Sektor Publik, berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kepulauan Mentawai?

### **Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pengaruh ketepatan sarasan anggaran dan pengendalian manajerial sektor publik, berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kepulauan Mentawai

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang (perencanaan keuangan) untuk mewujudkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun (Muhammad, 2016:90).

### Ketepatan Sasaran Anggaran

Pratiwy (2018:43) menjelaskan bahwa ketepatan sasaran anggaran dalam system pemerintahan daerah merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mengetahui kinerja yang terjadi di lapangan apakah tepat pada sasaran pembangunan dan perkembangan masyarakat. Ketepatan sasaran anggaran pada pemerintah daerah akan memberikan implikasi terhadap kinerja aparatur daerah yang lebih baik, maka hasil akhir dari kinerja sendiri merupakan hasil akhir (*output*) organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi.

### Pengendalian Manajerial Sektor Publik

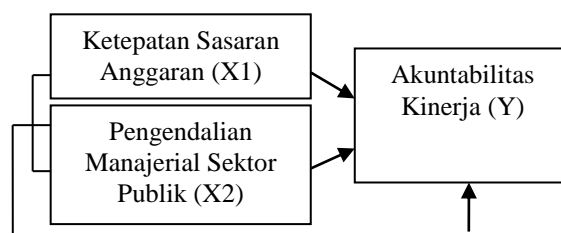
Sistem Pengendalian Manajerial adalah sebuah system yang terdiri dari beberapa anak system yang berkaitan, yaitu: pemrograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban untuk membantu manajemen mempengaruhi oranglain dalam sebuah perusahaan agar mau mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien (Suadi, 2017)

### Akuntabilitas Kinerja

LAN dan BPKP (LAN & BPKP, 2016:78) menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

### Kerangka Konseptual

Sesuai dengan telaah literatur yang telah dikemukakan di atas, dapat dikembangkan suatu kerangka teoritis yaitu sebagai berikut:



## METODE PENELITIAN

### Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang sebaik-baiknya dengan asumsi agar sasaran dalam penulisan dapat tercapai, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

- Penelitian Lapangan (*Field Research*)
- Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data peneliti mengumpulkan data dalam tiga cara yaitu:

- a. Observasi
- b. Dokumentasi
- c. Kuesioner

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer melalui Kuesioner disebarkan dan sekaligus dikumpulkan langsung oleh peneliti.

### **Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kepulauan Mentawai yang terdiri dari 65 orang..

#### **2. Sampel**

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi atau sebagian populasi yang menjadi subyek penelitian yang dapat mewakili populasi penelitian (Arikunto, 2010). Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode *purposive sampling*. Dalam penelitian ini, terdapat kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah pegawai yang terlibat langsung dalam penganggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kepulauan Mentawai yang berjumlah 35 orang.

### **Metode Analisis Data**

Analisis data tidak hanya digunakan untuk menguji hipotesis tetapi juga untuk pengujian statistik lainnya. Penelitian menggunakan skala pengukuran Likert. Skala Likert akan merubah variabel

### **Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi tersebut benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan (Ghozali, 2011:161)

#### **1. Uji Normalitas**

Uji Normalitas bertujuan untuk Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013: 160).

#### **2. Uji Multikolinieritas**

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen)

#### **3. Uji Heterokedastisitas**

Uji Heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2013:44)

### **Analisis Regresi Berganda**

Analisis regresi linier berganda adalah regresi linier untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari dua (Sugiono, 2014: 210). Adapun persamaan model regresi berganda tersebut adalah (Sugiono, 2014: 210):

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan:

Y : Akuntabilitas Kinerja

a : bilangan konstan

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub> : koefisien variabel bebas

X<sub>1</sub> : Ketepatan Saran Anggaran

X<sub>2</sub> : Pengendalian Manajerial Sektor Publik

### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sub>2</sub>) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:58).

### Uji Hipotesis

#### 1. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial (Ghozali, 2013).

#### 2. Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat (Ghozali, 2013).

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Uji Normalitas

**Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	Normal Parameters <sup>a,b</sup>
	Std. Deviation	
Most Extreme Differences	Absolute	Most Extreme Differences
	Positive	
	Negative	
Test Statistic		.099
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Dari Tabel 4.2 diketahui bahwa nilai Asym.Sig (2-tailed) untuk unstandardized residual sebesar 0,200, dapat disimpulkan bahwa nilai Asym.Sig (2-tailed) dalam penelitian ini nilainya lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan pada penelitian yaitu ( $\alpha = 0,05$ ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian berdistribusi normal, dengan demikian analisis regresi linear berganda dapat dilaksanakan karena data telah berdistribusi normal

### 2. Uji Multikolinieritas

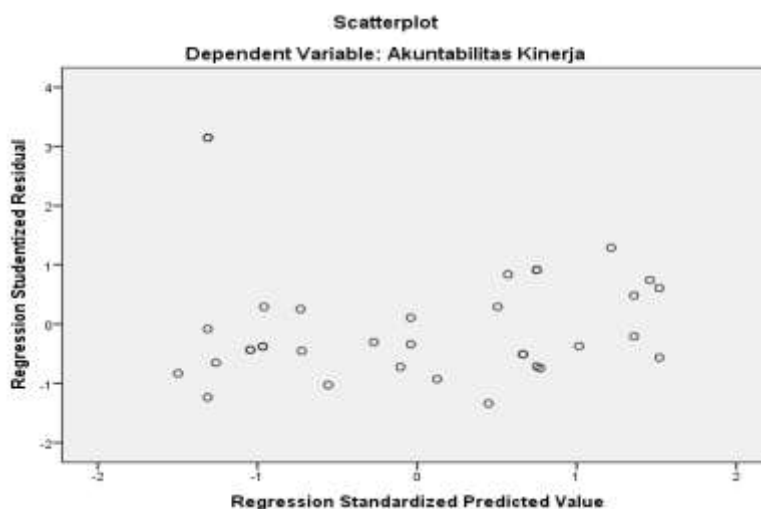
**Tabel 4.3**

No	Variabel	Cronbachs Apha		Keterangan
		Tolerance	VIF	
1	Ketepatan Sasaran Anggaran	0.163	6.123	Tidak Multikolinieritas
2	Pengendalian manajerial Sektor Publik	0.163	6.123	Tidak Multikolinieritas

Nilai *tolerance* dari *Collinearity Statistics* mendekati 1 (satu) dan nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*) untuk semua variabel bebas di bawah 10 (sepuluh). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang berarti antara sesama variabel bebas. Data hasil penelitian ini tidak mengalami kasus multikolinieritas.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.4 Uji Heterokedastisitas



Berdasarkan gambar 4.1 ditemukan penyebaran data tidak teratur, hal tersebut terlihat pada plot yang menyebar atau terpecah dan tidak membentuk pola tertentu, hal ini dapat disimpulkan tidak ada terjadi kasus heterokedastisitas.

#### 4. Regresi Linear Berganda

Tabel 4.5

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.789	4.258		1.594	.121
Ketepatan sasaran anggaran	.483	.121	.455	4.684	.001
Pengendalian Manajerial Sektor Publik	.755	.215	.640	3.509	.001

1. Nilai konstanta sebesar 6,789 yang berarti tidak ada variabel ketepatan sasaran anggaran dan pengendalian manajerial sektor publik, maka besarnya kinerja manajerial adalah 6,789.
2. Variabel ketepatan sasaran anggaran (X1) mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja, dengan koefisien regresi sasaran anggaran sebesar 0,483
3. Variabel pengendalian manajerial sektor publik (X2) mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja, dengan koefisien regresi sebesar 0,755

#### 5. Uji Koefisiensi Determinasi

Tabel 4.6

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.909 <sup>a</sup>	.826	.815	4.523

Besarnya nilai adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,815 yang berarti variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 81,5 % sedangkan sisanya 18,5% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

#### 6. Uji t

Tabel 4.7 Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.789	4.258		1.594	.121
Ketepatan Sasaran Anggaran	.483	.121	.455	4.684	.001
Pengendalian Manajemen Sektor Publik	.755	.215	.640	3.509	.001

Hasil perhitungan yang didapat pada tabel 4.7 variabel Ketepatan Sasaran Anggaran secara hasil yang signifikan pada nilai lebih kecil dari  $\alpha$  ( $0,001 < 0,05$ ).



Maka H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variable Ketepatan Sarasan Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja pada pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kepulauan Mentawai.

Variabel Pengendalian manajerial sektor publik secara nilai lebih kecil dari  $\alpha$  ( $0,001 < 0,05$ ). Maka H2 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variable pengendalian manajerial sektor publik berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kepulauan Mentawai

## 7. Uji F

**Tabel 4.8 Uji F**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	3113.030	2	1556.515	76.100	.000 <sup>p</sup>
Residual	654.513	32	20.454		
Total	3113.030	2	1556.515	76.100	.000 <sup>p</sup>

Berdasarkan tabel 4.19 di atas diperoleh tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$  Dapat disimpulkan bahwa ketepatan sarasan anggaran dan pengendalian manajerial sektor publik berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kepulauan Mentawai.

## Hasil dan Pembahasan

Bedasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, maka data hasil penelitian disajikan dan dianalisa sesuai dengan tujuan penelitian yang diajukan sebagai berikut:

### 1) Pengaruh Ketepatan Sarasan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja

Variabel ketepatan sarasan anggaran mempunyai nilai signifikansi 0,001 kurang dari 0,05. Hasil menjelaskan variabel ketepatan anggaran memiliki pengaruh pada akuntabilitas kinerja. Hal tersebut berarti bahwa variabel ketepatan anggaran telah berjalan dengan optimal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kepulauan Mentawai. Hal ini didukung dengan upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Mentawai dalam mengoptimalkan anggaran dengan melakukan pemangkasan program yang tidak tepat sasaran serta dihapusnya sejumlah kegiatan yang tidak penting, yang tidak mendukung kinerja intansi. Pemerintah memastikan anggaran hanya dipergunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

Ajibolade & Oboh (2017) menyatakan bahwa pengelolaan yang berakuntabilitas oleh pemerintah, tidak lepas dari anggaran, pada dasarnya, anggaran menempati posisi yang signifikan dan strategis dalam administrasi holistik dan keberlangsungan urusan suatu negara. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Bella Puspita Rininda (2020) dimana hasilnya menyatakan ketepatan anggaran memiliki pengaruh dengan akuntabilitas kinerja. Penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh Febrian Adhi Pamungkas (2018) Ketepatan Sasaran Anggaran secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja.

### 2) Pengaruh Pengendalian Manajerial Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja

Variabel pengendalian manajerial sektor publik mempunyai nilai signifikansi 0,001 kurang dari 0,05. Hal tersebut berarti bahwa sistem pengendalian manejerial sektor publik telah berjalan secara optimal pada pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kepulauan Mentawai. Hasil ini sesuai dengan keadaan bahwa kegiatan dilapangan telah berjalan dengan baik, dimana para pegawai eselon II, eselon III dan eselon IV saling bahu membahu agar terciptanya sistem pengendalian manajerial yang baik. Salah satu cara yang dilakukan agar terciptanya akuntabilitas yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kepulauan Mentawai dengan menerapkan *E-Government*

yang mana terbagi menjadi tiga yaitu, *E-Planning*, *E-Budgetting* dan *E-Monev*. Dengan *E-Government* tersebut maka pemerintah sangat transparan dengan masyarakat, sehingga semua masyarakat bisa melihat secara langsung melalui website atau aplikasi perencanaan, penganggaran dan monitoring serta evaluasi dapat diakses langsung oleh masyarakat luas (Hanafi, 2019).

Hasil penelitian ini sejalan penelitian Bella Puspita Rininda (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian manajerial sektor publik yang memiliki pengaruh dengan akuntabilitas kinerja. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Febrian Adhi Pamungkas (2018) bahwa Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Ida Ayu MadeDwiki Paramitha (2016) mengatakan bahwa system pengendalian manajerial sector public berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

### 3) Pengaruh Pengendalian Manajerial Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja

Ketepatan sasaran anggaran dan pengendalian manajerial sektor publik berpengaruh simultan terhadap akuntabilitas kinerja hal ini dapat dilihat pada tabel 4.16 bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti  $0,000 < 0,05$ . Penelitian yang dilakukan Bella Puspita Rininda (2020) dipatkan hasil bahwa dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 0,000, yang berarti uji statistik F menunjukkan hasil yang signifikan karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil daripada 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini layak untuk diteliti. Hasil penelitian Ida Ayu Made Dwiki Paramitha didapatkan bahwa analisis data menunjukkan nilai F sebesar 59,791 dengan tingkat signifikan 0,000, jadi hasil signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Hal ini berarti bahwa  $H_0$  ditolak, artinya ketepatan sasaran anggaran, system pengendalian manajerial sector public dan system pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja SKPD Kabupaten Tabanan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan analisa data, interpretasi hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Variable Ketepatan Sarasan Anggaran secara parsial berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja pada pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kepulauan Mentawai dengan nilai signifikansi 0,001 kurang dari 0,05. Sedangkan nilai t hitung  $X_1 = 4,684$  dan t tabel sebesar 2,034 sehingga t hitung  $>$  t tabel ( $4,684 > 2,034$ ).
2. Variable pengendalian manajerial sektor publik secara parsial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kepulauan Mentawai dengan nilai signifikansi ( $0,001 < 0,05$ ). Sedangkan nilai t hitung 3,509 = dan t tabel sebesar 2,034 sehingga ( $3,509 > 2,034$ ).
3. Variabel ketepatan sarasan anggaran dan pengendalian manajerial sektor publik berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kepulauan Mentawai dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti  $0,000 < 0,05$ . Sedangkan nilai f hitung lebih besar dari f tabel ( $76.100 > 4.13$ ).

## Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya. Dapat dilakukan dengan metode lain untuk mendapatkan data yang lengkap, misalnya dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden dalam pengisian kuesioner sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya. Serta untuk penelitian selanjutnya adanya penambahan variabel moderasi ataupun intervening yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas populasi penelitian, yaitu dengan menambah jumlah responden yang berkerja di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kepulauan Mentawai
2. Saran Bagi Responden. Penelitian ini menunjukkan bukti tentang pentingnya mengenai akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu, tepat bagi para responden untuk selalu menjaga dan lebih meningkatkan ketepatan sarasan anggaran dan pengendalian manajerial sektor publik sehingga tidak menimbulkan factor-faktor yang menurunkan akuntabilitas kinerja dan berguna bagi para pegawai khususnya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kepulauan Mentawai
3. Bagi Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kepulauan Mentawai. Bagi pimpinan di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kepulauan Mentawai diharapkan system pengendalian manajerial merupakan hal penting dalam system internal, seperti komunikasi antara atasan dengan bawahan, karena dengan adanya komunikasi dan system yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja disetiap dinas maupun OPD. Kepada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kepulauan Mentawai agar dapat transparan dalam penyusunan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan. Bagi pegawai juga terus meningkatkan pemahaman akan kesadaran pentingnya melakukan pendelegasian wewenang dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja mereka

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajibolade, & Oboh. (2017). A critical examination of government budgeting and public funds management in Nigeria. *International Journal of Public Leadership*, 13.
- Aman, Al-Shbail, & Mohammed. (2018). Enhancing Public Organization Accountability through E-Government Sy.
- Arikunto. (2010). Suharsimi Arikunto.pdf. In *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik-Revisi ke X*.
- Astari. (2018). Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Manajerial Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Akuntansi*, 12.
- Bastian. (2016). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar (3rd ed.)*. Jakarta: Erlangga.
- Ghozali, I. (2013). *Analisis Multivariate dengan program IBSM SPSS21*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahsun, M. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama*. Penerbit BPFE-Yogyakarta: Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2019). *Akuntansi Sektor Publik, Cetakan ke empat*. Yogyakarta: Penerbit

Andi.

- Muhammad, R. (2016). Akuntabilitas keuangan pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Accounting and Investment*. Recuperato da <http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/883>
- Paramitha, & Gayatri. (2016). Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik Dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja. *E-Jurnal Akuntansi*, 16.
- Sugiarti, E., & Yudianto, I. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia , Pemanfaatan Teknologi Informasi , Dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Klari , Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya).
- Sugiyono, S. (2014). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif.pdf. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Suwandi, A. P. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Desentralisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kota Padang. *Jurnal. Universitas Negeri Padang*.